

BAB II

TINJAUAN UMUM ORGANISASI

2.1. Profil Organisasi

Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan organisasi bagian dari pemerintahan daerah yang didirikan sebagai upaya pemerintah untuk mengelola pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Biro PBJ berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Dikutip dari website resmi mereka, Biro PBJ dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan teknis administrasi dan sumber daya, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, serta penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa. Biro PBJ terletak di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan No. 110, Surabaya, Jawa Timur.

2.2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi Organisasi:

Terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel dan kredibel.

b. Misi Organisasi

Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskrimantif dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi masyarakat.

2.3. Struktur Organisasi



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Biro PBJ

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggung jawab langsung atas koordinasi dan pengelolaan keseluruhan operasional biro. Di bawah kepemimpinan kepala biro tersebut, terdapat 3 kepala bagian lainnya yaitu, Kepala Bagian Pengelolaan PBJ, Kepala Bagian Pembinaan PBJ, dan Kepala Bagian Pengelolaan LPSE. Melalui struktur pada Gambar 2.1, Biro PBJ dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan efisien dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, selain itu juga Kepala Bagian Pengelolaan LPSE bertanggungjawab atas pembuatan surat perjalanan dinas.

2.4. Bidang Usaha Organisasi

Biro PBJ menyediakan layanan dan dukungan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, berikut diantaranya:

- a. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), berfungsi sebagai pendampingan terkait penyusunan dan penayangan Rencana Umum Pengadaan.
- b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), merupakan penyediaan layanan pengadaan secara elektronik baik kepada Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran maupun kepada Vendor selaku penyedia barang/jasa.
- c. Ecatalogue atau dikenal sebagai e-Katalog lokal milik Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu dengan jumlah etalase dan produk terbanyak di Indonesia.

Program Jatim Bejo untuk percepatan digitalasi pengadaan dan mendorong
pendayagunaan UMK dalam e-purchasing.